KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

2017

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

PER 31 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementrerian Komunikasi dan Informatika yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018
Dirjen Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1-2
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
	A. Penjelasan Umum	7-16
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17-23
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24-33
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	34-41
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42-46
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	47-50
VI.	Lampiran dan Daftar	

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
GEDUNG KEMENKOMINFO, JL.MEDAN MERDEKA BARAT NO. 9 JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kementrerian Komunikasi dan Informatika tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018
Dirjen Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.280.355.176. Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2017 adalah sebesar Rp. 324.995.725.488 atau mencapai 89,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 364.593.660.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp.191.743.875.500 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.19.066.214.035; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 114.612.514.960; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.58.065.146.505.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.542.690 dan Rp.191.742.332.810.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.944.816.513, sedangkan jumlah beban Operasional adalah sebesar Rp.198.093.181.208 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.197.148.364.695. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.3.122.315.880 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.164.469.081.774

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.39.112..291.414 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. 200.270.680.575 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.2.362.835.534 dan transaksi antarentitas senilai Rp.350.537.886.437 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.191.742.332.810

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017

disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM II TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		1.280.355.176		141.856.907
JUMLAH PENDAPATAN			**1.280.355.176**		**141.856.907**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	28.384.101.000	27.824.472.430	98,03	22.715.755.977
Belanja Barang	B.4	119.708.077.333	110.033.685.045	91,92	97.306.347.257
Belanja Modal	B.5	216.501.482.000	187.137.568.013	86,44	5.475.516.517
Hibah	B.6				1.826.510.012
JUMLAH BELANJA		**364.593.660.333**	**324.995.725.488**	**89,14**	**127.324.129.763**

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

NERACA

PER 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM II 2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	
Piutang PNBP	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	3.900.000	4.600.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(1.950.000)	(2.300.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	18.842.624.014	2.635.291.149
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	
Persediaan	C.10	68.568.000	275.234.809
Piutang Bukan Pajak	C.11	153.841.227	
Penyisihan Piutang Bukan pajak tidak tertagih	C.12	(769.206)	
Jumlah Aset Lancar		19.066.214.035	2.912.825.958
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	
Peralatan dan Mesin	C.15	176.492.194.598	40.327.347.212
Gedung dan Bangunan	C.16	-	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	-	
Aset Tetap Lainnya	C.18	885.711.886	195.140.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(62.765.391.524)	(30.652.363.254)
Jumlah Aset Tetap		114.612.514.960	9.870.123.958
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	62.368.565.346	6.671.314.777
Aset Lain-Lain	C.22	2.268.554.827	4.905.151.947
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(6.571.973.668)	(4.533.224.656)
Jumlah Aset Lainnya		58.065.146.505	7.043.242.068
JUMLAH ASET		**191.743.875.500**	**19.826.191.984**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1.542.690	2.370.993.116
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			2.370.993.116
JUMLAH KEWAJIBAN		1.542.690	2.370.993.116
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	191.742.332.810	200.971.583.878
JUMLAH EKUITAS		191.742.332.810	200.971.583.878

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA BAPK

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016

URAIAN	CATATAN	SEM II 2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	944.816.513	4.272.641
JUMLAH PENDAPATAN		**944.816.513**	**4.272.641**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	25.695.805.114	24.832.324.669
Beban Persediaan	D.3	2.377.543.758	851.898.204
Beban Barang dan Jasa	D.4	101.987.492.650	48.377.196.022
Beban Pemeliharaan	D.5	1.574.247.249	1.621.337.495
Beban Perjalanan Dinas	D.6	37.695.217.920	40.827.526.738
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.886.696.400	186.084.344.871
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	26.875.758.911	8.797.003.461
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	419.206	(300.000)
JUMLAH BEBAN		**198.093.181.208**	**311.391.331.460**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(197.148.364.695)	(311.387.058.819)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		21.700.000	94.000.000
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		3.616.685.179	(1.769.010.276)
Defisit Selisih Kurs		-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		545.647.200	39.188.090
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		72.977.901	(49.782)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		472.669.299	(1.635.871.968)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		3.122.315.880	(313.022.930.787)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA			-
SURPLUS/DEFISIT LO		**200.270.680.575**	**(313.022.930.787)**

(Dalam Rupiah)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM II 2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	39.112.291.414	200.971.583.878
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(200.270.680.575)	**(313.022.930.787)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.362.835.534	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	967.973.900
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUA	E.3.5	-	(5.481.221.678)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	
JUMLAH		-	(4.513.247.778)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	350.537.886.437	155.676.886.101
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	E.5	152.630.041.396	
EKUITAS AKHIR	E.6	**191.742.332.810**	**39.112.291.414**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2016 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada :

Pasal 14 :

1. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15 :

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

Pasal 16

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan e-Government;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan e-Government;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi

informatika serta pemberdayaan informatika;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementrerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Negara dan Hibah		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		
Jumlah Pendapatan	-	
Belanja		
Belanja Pegawai	28.384.101.000	28.384.101.000
Belanja Barang	119.708.077.000	119.708.077.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	216.501.482.000	216.501.482.000
Jumlah Belanja	**364.593.660.000**	**364.593.660.000**

Realisasi Pendapatan Rp. 1.280.355.176

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1.280.355.176 Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PNBP Lainnya			
-Pendapatan dari pemindatanganan BMN		21.700.000	
-Pendapatan Sewa,Tanah,Gedung<Bangunan		1.074.156	
-Pendapatan Hak dan Perizinan		789.901.130	
-Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan		700.000	
-Penerimaan kembali pegawai pegawai TAYL		11.394.824	
-Penerimaan kembali belanja barang TAYL		455.585.066	
Penerimaan Kembali persekot			
Jumlah	**-**	**1.280.355.176**	

Realisasi Belanja Rp. 324.995.725.488

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2017 adalah sebesar Rp.324.995.725.488 atau 80,14% dari anggaran belanja sebesar Rp.364.593.660.000,Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	2017		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	28.384.101.000	27.824.472.430	98,03
Belanja Barang	119.708.077.000	110.033.685.045	91,92
Belanja Modal	216.501.482.000	187.137.568.013	86,44
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja (NET)	**364.593.660.000**	**324.995.725.488**	**89,14**

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 53,04 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan PAGU Anggaran terutama pada Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	27.824.472.430	22.715.755.977	22,49
Belanja Barang	110.033.685.045	97.306.347.277	13,08
Belanja Modal	187.137.568.013	51.937.775.000	260,31
Hibah			
Jumlah	**324.995.725.488**	**171.959.878.254**	**89,00**

Belanja Pegawai Rp. 27.824.472.430

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.27.824.472.430 dan Rp.22.715.755.977 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 22% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI SEM II TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja gaji Pokok PNS	10.211.268.900	10.115.637.400	0,95
Belanja Pembulatan Gaji PNS	137.249	134.110	2,34
Belanja Tunj.Suami/Istri	713.931.410	684.209.760	4,34
Belanja Tunj.Anak	166.095.382	162.282.730	2,35
Belanja Tunj.Struktural	1.085.090.000	1.071.100.000	1,31
Belanja Tunj.Fungsional	67.790.000	35.595.000	90,45
Belanja Tunj.PPh PNS	83.238.972	165.675.392	(49,76)
Belanja Tunj.Beras PNS	484.127.700	477.537.480	1,38
Belanja Uang makan	1.081.587.000	1.251.302.000	(13,56)
Belanja Tunj.Umum PNS	271.175.000	297.085.000	(8,72)
Belanja gaji Pokok Non PNS	**50.398.400**	**0**	
Blanja tunjangan Pegawai non PNS	**88.000.000**	**0**	
Belanja tunjangan lainnya Non PNS	**9.789.840**	**0**	**-**
Bdlanja Pegawai (Tunjangan/kegiatan	**13.511.842.577**	**8.455.197.105**	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Neto	**27.824.472.430**	**22.715.755.977**	**22,49**

Belanja Barang Rp. 110.033.685.045

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.110.033.685.045 dan Rp. 97.306.347.257.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan 13 persen dari TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan PAGU di belanja barang Non Operasional dan persediaan konsumsi sepanjang tahun 2017.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	EALISASI SEM II TA 20	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.439.254.100	3.815.341.185	16,35
Belanja Barang Non Operasional	14.961.010.410	19.857.234.530	(24,66)
Belanja persediaan	2.174.953.860	2.354.011.532	
Belanja Jasa	47.530.723.761	28.842.787.032	64,79
Belanja Pemeliharaan	1.494.906.094	1.459.506.240	2,43
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.637.142.019	38.450.878.369	(9,92)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.908.998.401	2.376.648.389	22,40
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kpd ma	1.886.696.400		#DIV/0!
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		149.940.000	(100,00)
Jumlah Belanja	**110.033.685.045**	**97.306.347.277**	**13,08**

Belanja Modal Rp. 187.137.568.013

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.187.137.568.013 dan Rp.5.475.516.517. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 3.318% dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh pembelian alat DNS.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI SEM II T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.999.973.178	3.233.911.951	5620,62
Belanja Modal Lainnya	2.137.594.835	2.241.604.566	
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	**187.137.568.013**	**5.475.516.517**	**3317,72**

Belanja Modal peralatan dan Mesin Rp. 184.999.973.178

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp.184.999.973.178,.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN	
Belanja Peralatan dan mesin	184.999.973.178
JUMLAH	**184.999.973.178**

Belanja Modal lainnya Rp.

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

2.137.594.835

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.2.137.594.835 dan Rp.0. Realisasi TA 2017 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan adanya pengadaan *software* tambahan *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	21.379.594.835		
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal		0	
Jumlah Belanja	**21.379.594.835**	**0**	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

*Persediaan sebesar Rp.*68.568.000

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.68.568.000 dan Rp.275.234.809. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

JENIS	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	48.328.000	184.526.636
Barang untuk Pemeliharaan	-	2.184.873
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	20.240.000	
Aset tetap lainnya yg diserahkan ke masy	-	88.410.000
Persediaan Lainnya	-	113.300
Jumlah	68.568.000	275.234.809

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Kas diBendahara Pengeluaran Rp.0

C.2. Belanja Dibayar Dimuka

Saldo pada Belanja dibayar dimuka pada Desember 2017 sebesar Rp.18.842.624.014, hali ini dikaarenakan prepaid belanja pegawai sebesar Rp.13.641.314 dan prepaid belanja modal sebesar Rp.18.828.982.700

C.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0.

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak pada Desember 2017 sebesar Rp.153.841.227 yang berasal dari denda keterlembatan pekerjaan DNS di Direktorat Keamanan Informasi.

C.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.769.206 dan Rp.0

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Bagian Lancar TGR sebesar Rp.3.900.000

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.3.900.000 dan Rp.4.600.000.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan 2016

No	Nama	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bagian Lancar TGR	3.900.000	4.600.000
Jumlah		**3.900.000**	**4.600.000**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp.1.950.000,-

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Bagian Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.950.000 dan Rp.2.300.000.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			**-**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	3.900.000	50%	1.950.000
Macet		100%	-
Jumlah	**3.900.000**		**1.950.000**
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**3.900.000**		**1.950.000**

Peralatan dan Mesin
*Rp.*176.492.194.598

C.8. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.176.492.194.598 dan Rp.68.131.102.187. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2017	**Rp**	**68.131.102.187**
Mutasi tambah:	**Rp**	**115.292.251.738**
Pembelian	Rp	105.739.106.770
Transfer Masuk	Rp	9.519.260.818
reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	Rp	6.255.200
Pengembangan Nilai Aset	Rp	12.228.950
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	15.400.000
Mutasi kurang:	**Rp**	**6.931.159.327**
Penghentian Aset dari penggunaan	Rp	6.784.773.327
penghapusan	Rp	10.730.000
Transfer Keluar	Rp	135.656.000
Saldo per 31 Desember 2016	**Rp**	**176.492.194.598**

Mutasi tambah berupa:

a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa:

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Komputer Unit	79.223.076.473
2	Alat Kantor dan Rumah tangga	3.528.500.353
	Alat bengkel dan alat ukur	774.727.742
3	Alat Studio Kimunikasi dan pemancar	19.462.044.525
4	Alat Lab	2.531.364.824
5	Alat eksplorasi	219.392.853
6	Alat pealat dan produksi	
Jumlah		**105.739.106.770**

b. Transfer masuk sebesar Rp.9.519.260.818

c. Reklasifikasi dari aset lainnya ke Aset tetap sebesar Rp.6.255.200

d. Pengembangan Nilai Aset Sebesar Rp.12.228.950 dan

e. Koreksi pencatatan nilai Sebesar Rp.15.400.000

Mutasi kurang,

- Pengehentian Aset dari penggunaan sebesar Rp.6.784.773.327
- Penghapusan sebesar Rp.10.730.000
- Transfer keluar sebesar Rp.135.656.000
-
- Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap **C.9. Aset Tetap Lainnya**

Lainnya Rp 885.711.886

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.885.711.886 dan Rp.737.586.236

Saldo per 1 Januari 2017	**737.586.236**
Mutasi tambah:	6.921.206.870
Pembelian	6.771.431.220
Transfer Masuk	149.775.650
Mutasi kurang:	(6.773.081.220)
Transfer keluar	(6.773.081.220)
Saldo per 31 Desember 2017	**885.711.886**

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada tahun 2017 berasal dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp.6.843.306.870

  Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi kurang:

- Transfer keluar sebesar Rp.6.773.081.220

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.- 62.765.391.524

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.62.765.391.524 dan Rp.37.341.471.919.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	176.492.194.598	62.765.391.524	113.726.803.074
4	Aset Tetap Lainnya	885.711.886		885.711.886
Akumulasi Penyusutan		**177.377.906.484**	**62.765.391.524**	**114.612.514.960**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

*Aset Tak Berwujud Rp.*62.368.565.346

C.11. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.62.368.565.346 dan Rp.6.671.314.777. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2017

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 2.995.010.885
2	Lisensi	Rp 54.416.737.461
3	ATB Lainnya	Rp 4.956.817.000
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2017		Rp 62.368.565.346

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	**Rp**	**6.671.314.777**
Mutasi tambah:	**Rp**	**54.740.177.461**
pembelian software	Rp	193.890.000
Pembelian Aset ATB lainnya	Rp	129.550.000
Lisensi	Rp	54.416.737.461
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	**Rp**	**551.100.000**
Aset tak berwujud lainnya	Rp	551.100.000
Pengembangan Nialai Aset	**Rp**	**435.800.000**
Aset tak berwujud lainnya	Rp	435.800.000
Mutasi Kurang	**Rp**	**29.826.892**
software komputer	Rp	25.226.892
ATB alainnya	Rp	4.600.000
	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2016	**Rp**	**62.368.565.346**

Mutasi tambah:

- Pembelian software komputer sebesar Rp.193.890.000
- Pembelian aset ATB lainnya sebesar Rp.129.550.000
- Lisensi sebesar Rp.54.416.737.461
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp.551.100.000
- Pengembangan Nilai Aset Sebesar Rp.435.800.000

Mutasi kurang:

- Koreksi pencatatan software komputer Rp.25.226.892
- Koreksi atas aset tak berwujud lainnya Rp.4.600.000

*Aset Lain-Lain Rp.*2.268.554.827

C.12. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.2.268.554.827 dan Rp.4.905.151.947. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2017	**Rp**	**4.954.116.947**
Mutasi tambah:	**Rp**	**6.786.423.327**
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya (	Rp	6.786.423.327
	Rp	-
Mutasi Kurang	**Rp**	**9.471.985.447**
Usulan Barang Rusak Berat	Rp	9.465.730.247
penggunaan kembali BMn	Rp	6.255.200
Penghapusan (BMN yang dihentikan dari pe	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**2.268.554.827**

Mutasi tambah berasal dari:

a. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp.6.786.423.327

Mutasi kurang berasal dari:

a. Usulan Barang rusak sebesar Rp.9.465.730.247
b. Penggunaan kembali BMN sebesar Rp.6.255.200

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.6.571.973.668

C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.6.571.973.668 dan Rp.4.533.224.656. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp 62.368.565.346		
Software Komputer	2.995.010.885	4.303.946.841	(1.308.935.956)
Lisensi	54.416.737.461		54.416.737.461
ATB Lainnya	4.956.817.000		4.956.817.000
Jumlah	**62.368.565.346**		**58.064.618.505**
Aset Lainnya	2.268.554.827	2.268.026.827	528.000
Jumlah	**64.637.120.173**	**6.571.973.668**	**58.065.146.505**
Total	**127.005.685.519**	**6.571.973.668**	**116.129.765.010**

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp.*1.542.690

C.14. Utang Pada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan

2016 masing-masing sebesar Rp.1.542.690 dan Rp.2.370.993.116. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari kekurangan gaji pegawai.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Kekurangan bayar Tunkin	-
2	Kekurangan gaji	Rp 1.542.690
4	Utang kepada Pihak Lainnya	-
Total		**Rp 1.542.690**

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran.

Uang muka dari KPPN sebesar Rp.0

C.15. Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN sebesar Rp.0

*Ekuitas Rp.*191.742.332.810

C.16. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.191.742.332.810 dan Rp.39.112.291.414 . Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp. 944.816.513

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.944.816.513 dan Rp.4.272.641. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.074.156	1.074.156	-
Pendapatan Dendan keterlambatan	153.841.227	2.846.285	-
Pendapatan Hak dan Perizinan	789.901.130	-	100
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	352.200	-
Jumlah Pendapatan Jasa	**944.816.513**	**4.272.641**	22.013

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan Sewa tanah bangunan,pendapatan denda keterlambata pekerjaan dan Pendapatan Hak dan Perizinan yang berasal dari 5 % pendapatan kotor PANDI.

Beban Pegawai Rp. 25.695.805.114

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.25.695.805.114 dan Rp.24.832.324.669. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI SEM II TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja gaji Pokok PNS	10.167.931.881	10.159.630.819	0,08
Belanja Pembulatan Gaji PNS	137.249	134.110	2,34
Belanja Tunj.Suami/Istri	713.997.050	684.209.760	4,35
Belanja Tunj.Anak	166.095.382	162.282.730	2,35
Belanja Tunj.Struktural	1.085.090.000	1.071.100.000	1,31
Belanja Tunj.Fungsional	67.790.000	35.595.000	90,45
Belanja Tunj.PPh PNS	83.403.622	165.675.392	(49,66)
Belanja Tunj.Beras PNS	484.127.700	477.537.480	1,38
Belanja Uang makan	1.082.243.000	1.251.302.000	(13,51)
Belanja Tunj.Umum PNS	271.175.000	297.085.000	(8,72)
Belanja gaji Pokok Non PNS	**50.398.400**	**0**	
Blanja tunjangan Pegawai non PNS	**88.000.000**	**0**	
Belanja tunjangan lainnya Non PNS	**9.789.840**	**0**	**-**
Bdlanja Pegawai (Tunjangan/kegiatan	**11.425.625.990**	**10.527.772.378**	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Neto	**25.695.805.114**	**24.832.324.669**	**3,48**

Beban Persediaan Rp. 2.377.543.758

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.2.377.543.758 dan 851.898.204.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.377.543.758	851.728.254	179,14
Beban Persediaan Lainnya	-	169.950	
Jumlah Beban Persediaan	**2.377.543.758**	**851.898.204**	179,09

Beban Barang dan Jasa Rp. 101.987.492.650

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 101.987.492.650 dan Rp.48.377.196.022.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	1.554.192.500	1.524.890.000	2
Beban Penambah daya tahan tubuh	238.842.000	244.513.900	(2)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	28.000	974.000	(97)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.491.970.500	1.911.525.000	30
Beban barang Operasional lainnya	154.221.100	133.438.285	16
Beban Bahan	**8.536.455.410**	8.386.928.189	2
Beban Honor Output Kegiatan	6.061.447.500	5.646.320.000	7
Beban barang Non Operasional Lainnya	363.107.500	4.066.686.341	(91)
Beban Langganan listrik	195.107.030	47.055.838	315
Beban jasa Pos dan Giro	-	5.087.400	(100)
Beban jasa konsultan	36.814.140.490	575.885.000	6.293
Beban Sewa	13.049.603.543	5.164.977.197	153
Beban Jasa profesi	10.030.830.000	12.245.118.800	(18)
Beban Jasa lainnya	22.497.547.077	8.423.796.072	167
Jumlah	**101.987.492.650**	**48.377.196.022**	111

Beban Pemeliharaan Rp. 1.574.247.249

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.574.247.249 dan Rp.1.621.337.495. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban

pemeliharan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagaiberikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	60.154.300	124.791.095	(52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.318.873.829	1.278.320.132	3
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	170.987.800	198.894.821	(14)
Beban Pemeliharaan Lainnya	14.465.000	-	-
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	9.766.320	19.331.447	(49)
Jumlah	**1.574.247.249**	**1.621.337.495**	(3)

Beban Perjalanan Dinas Rp. 37.695.217.920

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.37.695.217.920 dan Rp.40.427.526.738. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.449.721.537	5.630.538.014	-20,97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	154.070.000	198.280.000	-22,30
Kota	2.671.800.151	3.746.383.388	-28,68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.510.627.831	28.875.676.967	-4,73
Beban Perajalan Biasa-Luar Negri	0	424.145.551	-100,00
Beban perjalanan lainnya-Luar negri	2.908.998.401	1.952.502.818	
Jumlah	**37.695.217.920**	**40.827.526.738**	-7,67

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

1.886.696.400

Rp.1.886.696.400 dan Rp. 186.084.344.871

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bertujuan untuk meningkatkan pemahaman/kemampuan masyarakat mengenai pemahaman/penggunan fasilitas komputer. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Maysarakat TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Bantuan Lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah	1.886.696.400	0	0,00
Beban Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	0	8.991.770	-100,00
Beban Barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	0	4.543.539.771	-100,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat		181.531.813.330	-100,00
Jumlah	**1.886.696.400**	**186.084.344.871**	-98,99

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 26.875.758.911

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.875.758.911 dan Rp.8.797.003.461. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA

2017 dan TA 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.410.139.742	8.084.000.924	190
Beban Amortisasi software	672.140.919	583.700.017	15
Beban amortisasi lisensi	2.720.836.873	34.155.502	7.866
Beban penyusutan aset tetap yg tidak digunakan dalam	8.752.081	63.889.303	(86)
Bebas Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak digunakan Dalam operasional Pemerintahan	63.889.296	31.257.715	104
Jumlah	**26.875.758.911**	**8.797.003.461**	206

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih *Rp.350.000*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.350.000- dan Rp. 300.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	419.206	300.000	40
Jumlah	**419.206**	**300.000**	40

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 3.122.315.880

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiridari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.3.122.315.880 dan Rp.1.635.871.968.

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	21.700.000	94.000.000	-76,91
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-3.616.685.179	-1.769.010.276	104,45
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	545.647.200	39.188.090	1292,38
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-72.977.901	(49.782)	146494,96
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-3.122.315.880**	**-1.635.871.968**	90,87

Pos-Pos Luar Biasa Rp.-

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Tidak ada Pos-Pos Luar Biasa pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.39.112.291.414

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp.39.112.291.414

Defisit LO Rp. 200.270.680.575

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar Rp.200.270.680.575 dan Rp.313.022.930.787. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.967.973.900 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 2.362.835.534

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 2.362.835.534 dan Rp.(5.481.221.678).. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 2017	Nilai Koreksi 2016	NAIK (TURUN
Koreksi Nilai Aset tetap Non revaluasi	8.650.000	3.722.353.523	-99,77
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non revaluasi	2.354.185.534	1.758.868.155	33,85
Jumlah	**2.362.835.534**	**5.481.221.678**	-56,89

Koreksi Lain-lain Rp. 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 2017	Nilai Koreksi 2016	NAIK (TURUN
Koreksi Lainnya		-	
Jumlah	**-**	**-**	

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp. 350.537.886.437

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.350.537.886.437 dan Rp.155.676.886.101. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURU
Diterima dari Entitas Lain	(1.280.355.176)	(141.856.907)	802,57
Ditagihkan ke Entitas Lain	324.995.725.488	1.125.497.619.751	-71,12
Transfer Masuk	843.618.188	-	
Transfer Keluar	(7.095.164.607)	(192.890.000)	3578,35
Pengesahan Hibah Langsung	33.074.062.544	30.514.013.257	8,39
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-	
Jumlah	**350.537.886.437**	**1.155.676.886.101**	-69,67

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain sebesar Rp.- (1.280.355.176)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp.(1.280.355.176) sedangkan DKEL sebesar Rp.324.995.725.488.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk Rp.

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan

843.618.188

.

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk 31 Desember 2017 sebesar Rp. 843.618.188 sedangkan transfer keluar sebesar Rp.(7.095.164.607)

E.4.3.Pengesahan Hibah Langsung

Saldo pengesahan Hibah langsung pada Desember 2017 senilai Rp 33.074.062.544,pengesahan hibah langsung berupa jasa berasal dari KOICA.

Ekuitas Akhir Rp. 191.742.332.810

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.191.742.332.810 dan Rp. 39.112.291.414.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Terdapat pengesahan hibah berupa jasa dari pekerjaan yang telah selesai dikerjakan tahun 2016 pada Direktorat Keamanan Informasi dari KOICA dengan nilai US$ 2.493.521 setara dengan Rp 33.074.062.544,- dan dengan nomor pengesahan 2017018664262001.

b. Terdapat pencatatan transaksi transfer masuk dari Ditjen PPI terkait IDISIRTI senilai Rp. 9.535.475.418,-

c. Terdapat Pengadaan Sistem Perangkat Pemantauan Proaktif dan Perangkat Sistem Pusat Kendali untuk Penanganan Konten Bermuatan Negatif pada Direktorat Keamanan Informasi senilai Rp 183.058.726.206,-, yang dicatatkan berupa peralatan dan mesin senilai Rp. 99.546.049.086,-, serta gedung dan bangunan dalam renovasi senilai Rp. 6.771.431.220,-. Sedangkan untuk lisensi senilai Rp. 57.912.263.200,- dan sewa jaringan senilai Rp. 18.828.982.700,- tidak dicatatkan dalam transaksi BMN.

d. Terdapat pencatatan transaksi transfer keluar penyerahan Aset Tetap Renovasi berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi kepada Biro Umum terkait renovasi gedung depan lantai 8 Kementerian Kominfo senilai Rp. 6.771.431.220,-

e. Terdapat kesalahan penggunaan MAK 536111 yang seharusnya 532111 yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp 757.680.000,-. Nilai ini dicatatkan sebagai transaksi pembelian Peralatan dan Mesin pada Direktorat Keamanan Informasi.

f. Terdapat kesalahan penggunaan MAK 536111 yang dipergunakan untuk membeli lisensi sebesar Rp. 14.465.000,- pada Direktorat Keamanan Informasi. Transaksi ini tidak dicatatkan pada aplikasi SIMAK.

g. Terdapat pengembangan aset tak berwujud pada Direktorat Keamanan Informasi senilai Rp. 197.000.000,- atas aset tak berwujud pada Direktorat e-Government berupa Pengembangan Fitur Lanjutan Aplikasi PNSMAIL, yang dicatatkan sebagai pengembangan ATB Direkktorat e-Government.